

**TAHUN
2018**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sagan III/4 Yogyakarta
Telp (0274) 512386 Faks (0274) 560286
<http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini dengan tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Februari 2018

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY dengan indikatornya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 320.348
- b. Sasaran 2: Meningkatnya status kawasan konservasi dengan indikatornya Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah 20%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) dengan capaian 101,80% dari targetnya dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian 104,96% dari targetnya, Nilai ekspor 100%, Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB 100%, Jumlah unit pembudidaya ikan bersertifikat CBIB 100% dan Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diuji bebas residu 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
2. Kesiapan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dalam menyambut bandara baru NYIA di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6 Keuangan	11
1.7 Sistematisasi LKj IP	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018	21
2.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	22
2.4 Instrumen Pendukung	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018	25
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	25
3.2.2 Sasaran Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan	32
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	36
3.4 Realisasi Anggaran	38
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	4
Tabel I.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan.....	7
Tabel I.3 Kondisi Sarana dan Prasarana BPTPB.....	8
Tabel I.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.....	9
Tabel I.5 Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.....	12
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022.....	16
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	18
Tabel 2.3 Strategi, Arah kebijakan.....	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018.....	21
Tabel II.6 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018	22
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018.....	25
Tabel 3.3 Rumusan Indkator dan Formulasi Perhitungan.....	26
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	27
Tabel III.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan.....	29
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	33
Tabel III. 6 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2.....	35
Tabel III.9 Indikator Kinerja dari Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.....	35
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018.....	38
Tabel 3.6 Analisis efisiensi.....	40

Daftar Gambar



Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.....	2
Gambar I.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	6
Gambar II.1 Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.....	23
Gambar III.1 Grafik PDRB Subsektor Perikanan 2013-2018.....	28
Gambar III.2 Foto kegiatan budidaya dengan sistem Bioflok.....	29
Gambar III.3 Kegiatan Penyiapan KPBU Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta.....	31
Gambar III.4 Foto Kegiatan Penyusunan KLHS RZWP3K.....	34
Gambar III.4 Foto Kegiatan Pengawasan Laut.....	36

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

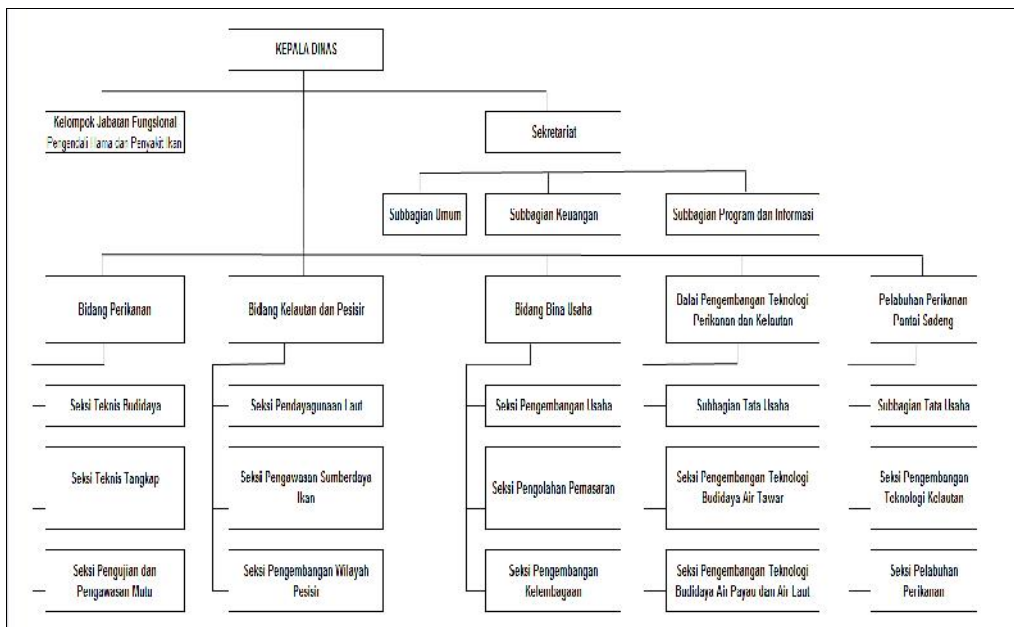
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 masih menggunakan struktur Perdas 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 17 Juni 2015 menetapkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja ;
- b) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c) pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan
- d) perikanan, wilayah pesisir;
- e) pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
- f) pemberian fasilitasi penyelenggaraan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
- g) pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
- h) penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan lintas kabupaten/kota;
- i) perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
- j) pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- k) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY , antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan dan rencana operasional NYIA harus disikapi dengan bijaksana dan tepat, terutama tentang pengelolaan wilayah sekitar Bandara.
2. Kebutuhan yang mendesak untuk beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarta sebagai wilayah dukung pertumbuhan ekonomi berbasis nelayan.

3. Peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan agar mempunyai daya saing yang tinggi
4. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambil dan pilihan pekerjaan terakhir. Maka perlu upaya untuk membangun generasi nelayan yang baru, yang lebih baik kualitasnya dan semangatnya.
5. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, serta terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
6. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.

1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berjumlah 123 orang, dengan rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 61 orang, pegawai UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) sejumlah 43 orang dan pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sejumlah 19 orang. Rincian jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

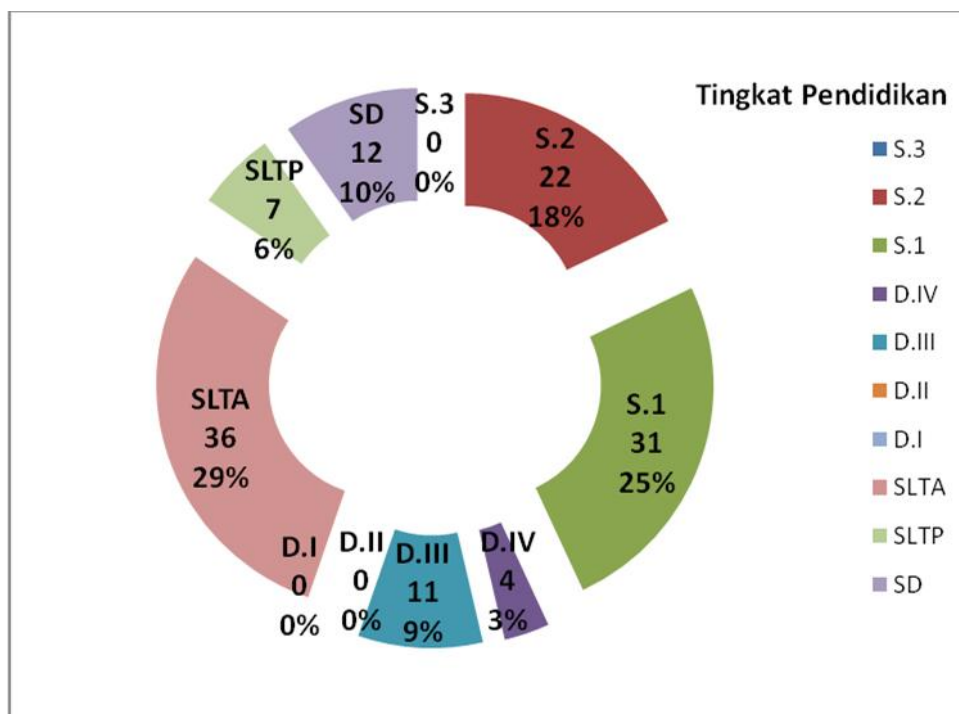
INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dinas Kelautan dan Perikanan	34	27	61
BPTPB	39	4	43
PPP Sadeng	19	0	19
Jumlah	94	29	123

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 74,80%. Jumlah pegawai pada

dinas induk mencapai 49,59 % sedangkan jumlah pegawai pada UPTD BPTKP Cangkringan mencapai 34,96% dan PPP Sadeng sebesar 15,45%.

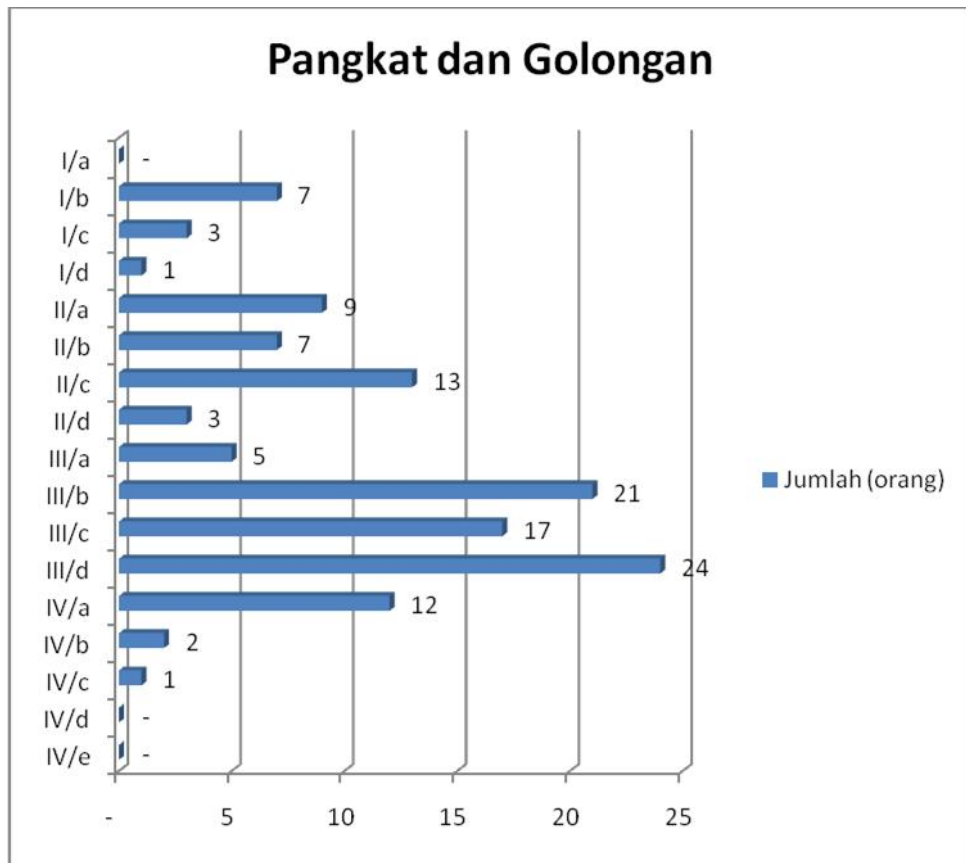
Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar I.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagian besar berpendidikan SLTA/ sederajat dengan jumlah sebanyak 36 orang atau 29 %. Disusul dengan tingkat pendidikan S.1 sebanyak 31 orang atau 26%. Tingkat pendidikan paling tinggi adalah S.2 atau sejumlah 22 orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling rendah adalah SD atau pendidikan dasar sejumlah 12 orang.

Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan didominasi oleh golongan III/d dengan pangkat Penata Tingkat 1 sebanyak 24 orang. Kemudian disusul dengan golongan III/b dengan pangkat Penata Muda sebanyak 21 orang. Golongan tertinggi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah golongan IV/c atau Pembina sebanyak 1 orang dan golongan terendah adalah golongan I/b atau Juru Muda Tingkat I sejumlah 7 orang. Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan disajikan sebagai berikut:



Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 77 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY No 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY jumlah kebutuhan pegawai 112 orang baru terisi 61 orang atau baru terisi 54,46%.
- 2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) jumlah kebutuhan pegawai 107 orang terisi 43 orang atau baru terisi 43,00%.
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng kebutuhan pegawai 58 orang terisi 19 orang atau baru terisi 32,76%.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas kelautan dan Perikanan DIY telah cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selengkapnya mengenai kondisi riil sarana dan prasarana aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon II	1	1
2	Kursi Eselon III	4	4
3	Kursi Eselon IV	12	12
4	Kursi Staf	45	100
5	Meja Eselon II	1	1
6	Meja Eselon III	4	4
7	Meja Eselon IV	12	12
8	Meja Staf	40	100
9	AC	31	50
10	Komputer	36	37
11	Laptop	62	63
12	Filling Cabinet	37	38
13	Almari Arsip	25	40
14	Kendaraan Roda Empat	15	15
15	Sepeda Motor	21	21
16	LCD/Proyektor	8	10
17	Printer	53	53
18	Mesin Facimili	1	1

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Namun sarana dan prasarana aparatur ini belumlah berada pada kondisi ideal. Keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Telah dilakukan upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan perikanan DIY, antara lain melalui kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana aparatur di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana BPTPB

No	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kursi Eselon III	1	1
2	Kursi Eselon IV	4	4
3	Kursi staf	39	121
4	Meja Eselon III	1	1
5	Meja Eselon IV	4	4
6	Meja Staf	35	117
7	AC	18	20
8	Komputer	8	16
9	Laptop	17	20
10	Filling Cabinet	1	9
11	Almari Arsip	23	38
12	Kendaraan Roda Empat	5	9
13	Kendaraan Roda Tiga	4	4
14	Kendaraan Roda Dua	11	11
15	LCD/Proyektor	3	5
16	Printer	11	20
17	Mesin Facimili	0	1
18	Mesin tik Manual	14	14

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Sarana dan Prasarana BPTPB tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena tidak ada pengadaan sarana dan prasarana baru. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan melalui program Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.

Sarana dan Prasarana di PPP Sadeng juga tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena tidak ada pengadaan sarana dan prasarana baru. Berikut ini kondisi sarana dan prasarana aparatur di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng:

Tabel 1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

No.	Nama Barang	Kondisi Riil	Kondisi Ideal
1	Kendaraan Roda 4	1	3
2	Kendaraan Roda 2	3	10
3	Genset	0	2
6	Kursi Eselon Iv	6	6
7	Meja Eselon Iv	6	6
8	Meja Eselon Iii	2	3
9	Kursi Eselon Iii	3	3
10	Pc Unit	15	20
11	Lap Top	12	15
12	Mesin Ketik	1	1
13	Kipas Angin	0	0
14	Filling Kabinet	19	19
15	Lemari Arsip	5	6
16	Rak Buku	0	3
17	Printer	16	20
18	Lcd	4	4
19	Mesin Pompa	11	11
20	Lemari Kaca	1	1
21	Lemari Kayu	3	3
22	Kursi Metal	26	26
23	Meja 1/2 Biro	1	1
24	Tempat Tidur Kayu	28	28
25	Meja Rapat	56	56
26	Kursi Rapat	136	136
27	Lemari Pakaian	24	24
28	Ac Unit	4	4
29	Antena SHF	1	1
30	Scaner	2	5
31	Meja Kerja Pengawai Non Struktural	4	4
32	Papan Pengumuman	2	2
33	Meja Makan	4	4
34	Televisi	9	9
35	Viewer	1	1
36	Camera Film	1	1
37	Meja Tulis	2	2

38	Kursi Tamu	4	4
39	Gordyn	70	70
40	Lemari Es	3	3
41	AC Split	17	17
42	Camera Digital	2	2
43	Megaphone	1	1
44	Peti Uang	1	1
45	Meja Kayu	15	15
46	Kursi Kayu	10	10
47	Meja Respsion	1	1
48	Meja Komputer	5	6
49	Sofa	15	15
50	Partisi Kantor	15	15
51	Partisi Ruangan Kantor	2	2
52	Jam Mekanis	8	8
53	Amplifier	1	1
54	Loudspeaker	2	2
55	Sound System	1	1
56	Microphone	3	3
57	Dispencer	6	6
58	Alat Pemadam/ Portable	2	4
59	Speaker Aktif Komputer	5	5
60	Ups	6	6
61	Layar Film	4	4
62	Pesawat Telephone	8	8
63	Facsimile	1	1
64	Dongkrak Kapal	3	3
65	Kasur	24	24
66	Bantal	70	70
67	Sprei	45	45
68	Mesin Potong Rumput	8	8
69	Kompor Gas	4	8
70	Alat Penanak Nasi	4	7
71	Tabung Gas	6	8
72	Tangga Alumunium	4	4
73	Server	1	1
74	D-Link	1	4

75	CCTV	1	1
76	Tiang AWS Monopole + Aksesoris	1	1
77	Lampu Sinyal Menara	1	1
78	Proteksi Petir	1	1
79	Power Distribution Board	1	1
80	Solar Panel	1	1
81	Barometer	1	1
82	Wind Sensor Set	1	1
83	Alat Ukur Kelembaban Dan Suhu Udara	1	1
84	Alat Ukur Curah Hujan	1	1
85	Pyranometer	1	1
86	Stasiun Cuaca Otomatis	1	1
87	Guling	25	25
88	Selimut Wool	25	25
89	Rak Piring	1	1
90	Alat Penarik Kapal	3	3

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada tahun 2018 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.404.378.159,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.7.413.517.728,- dan belanja langsung sebesar Rp.15.990.860531,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 15.990.860531,- yang didukung oleh 7 program dan 15 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan sebesar Rp. 480.225.000- yang didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

Anggaran APBN terdiri dari dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didistribusikan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya, Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan

Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Secara rinci jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut:

Tabel I.5 Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

SUMBER ANGGARAN	JUMLAH (RP)
➤ APBD	23.404.378.159
Belanja Tidak Langsung	7.413.517.728
Belanja Langsung	15.990.860531
o Dana Keistimewaan (Tata Ruang)	480.225.000
➤ APBN (Dekonsentrasi)	2.325.646.000
Jumlah Total	26.210.249.159

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY . Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Perencanaan Strategis*
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
- 3. Rencana Anggaran Tahun 2018*
- 4. Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan manifestasi komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2012-2023.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project) serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa

apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

serta dilaksanakan dengan 2 misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3)
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;
(misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5)

Visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					diapresiasi
				1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

(Sumber: RPJMD DIY, 2018)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator capaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
2. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	Juta rupiah	317.809	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi	persen	N/A	20	30	60	80	100	100

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan reviu Renstra. Reviu dilakukan sebagai bentuk penajaman kegiatan dan tolok ukur

kegiatan. Reviu Renstra ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022

2.1.3 Strategi dan Arah kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3 Strategi, Arah kebijakan

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1. Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 2. Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan 3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk olahan 4. mengembangkan sistem pemasaran yang modern
2	Meningkatnya status kawasan konservasi	1. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 2. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi	1. Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan 2. Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkat nya nilai produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton	89.336	27.500	45.300	63.200	89.336
		Produksi perikanan tangkap	Ton	5.817	1.200	2.850	4.600	5.817
		Produksi produk perikanan olahan	Ton	8.201	1.800	3.800	6.000	8.201
		Produksi benih ikan yang bersertifikat	Juta ekor	31,3	6,03	11,92	17,70	31,3
		Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan	Milyar rupiah	32,84	4,8	15	25,2	32,84
2	Terkelolan ya kawasan konservasi perairan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	14	0	0	0	14
		Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	10	0	0	0	10

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Reviu dilakukan karena terjadi pergantian pejabat. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkat nya nilai produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton	89.336	27.500	45.300	63.200	89.336
		Produksi perikanan tangkap	Ton	5.817	1.200	2.850	4.600	5.817
		Produksi produk perikanan olahan	Ton	8.201	1.800	3.800	6.000	8.201
		Produksi benih ikan yang bersertifikat	Juta ekor	31,3	6,03	11,92	17,70	31,3
		Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan	Milyar rupiah	32,84	4,8	15	25,2	32,84
2	Terkelola nya kawasan konservasi perairan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	14	0	0	0	14
		Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	10	0	0	0	10

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 23.120.003.973,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.527.901.680,- dan Belanja

Langsung Rp 14.601.100.293,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 23.404.378.259,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 7.413.517.728,- dan Belanja Langsung Rp . 15.990.860.531,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY

Tabel II.6 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY APBD Perubahan Tahun 2018

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.413.517.728,-	31,68 %
Belanja Langsung	Rp. 15.990.860.531,-	68,32 %
Jumlah	Rp. 23.404.378.259,-	100,00%

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

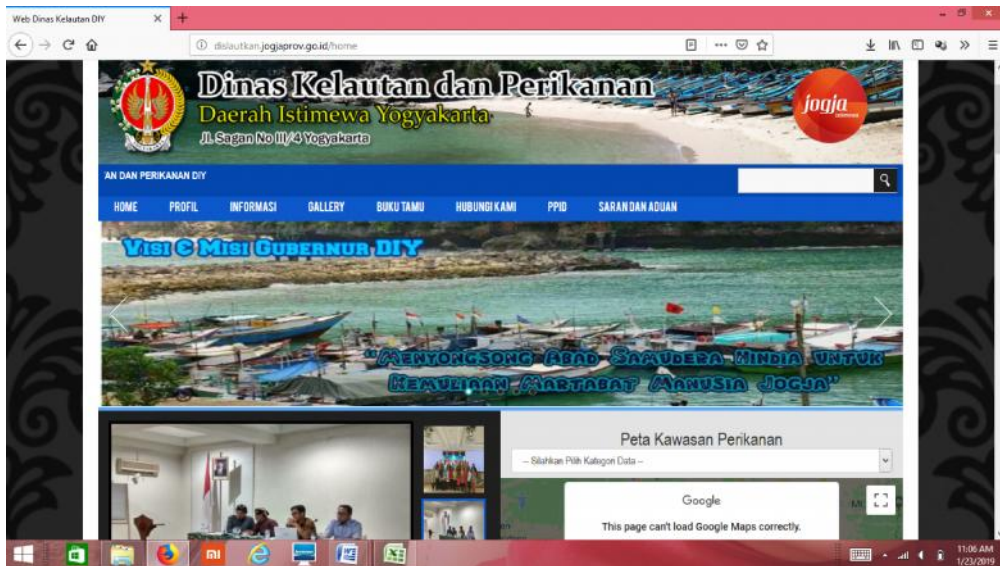
No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	14.518.964.281	92,41	Sasaran ini didukung oleh 8 program dan 31 kegiatan
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	1.191.771.250	7,59	Sasaran ini didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

II.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung berupa website yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu sebagai berikut:

Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (<http://dislautkan.jogjaprov.go.id>)



Gambar II.1 Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2018*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	(juta rupiah)	318.947	320.348	100,44	Sangat Baik
2	Terkelola nya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	(%)	20	20	100	Sangat Baik

(Sumber: BPS 2019 dan Dislautkan DIY, 2018)

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator. Pada tahun 2018, 2 (dua) indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **(tercapai $\geq 100\%$) 100%** dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada indikator PDRB dengan persentase 100,44%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: PDRB sektor perikanan (Juta Rupiah).

Produk Domestik Regional (PDB/PDRB) beserta indikator turunannya merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan kegiatan perekonomian suatu wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu.

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Kinerja sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan dengan indikator Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	317.809	318.947	320.348	100,44	331.897	96,52

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Pada tahun 2018 ini realisasi Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY mencapai 320.348 juta rupiah atau sebesar 100,44% dari targetnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terjadi peningkatan nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY.

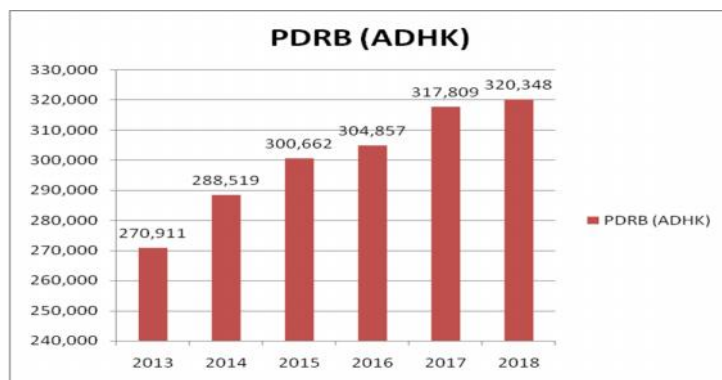
Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 320,348 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, yaitu 331,897 maka capaian ini sudah sebesar 96,52 % untuk target jangka menengah di RPJMD.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Bahkan, indeks perkembangan riil lapangan usaha pertanian ini paling lambat di antara semua lapangan usaha. Hal ini menunjukkan belum banyak inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu perlu ada terobosan teknologi dalam pengelolaan usaha pertanian agar produktivitas output meningkat (BSD DIY, 2018).

Kontribusi PDRB DIY tahun 2017 terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi DIY terhadap Pulau Jawa turun 0,1 poin, yaitu dari 1,48 persen menjadi 1,47 persen, dan peringkatnya terendah di antara enam provinsi. Kontribusi terhadap 34 provinsi di Indonesia juga sedikit turun, yaitu dari 0,87 persen menjadi 0,86 persen. Kontribusi DIY yang tidak beranjak naik tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi DIY meskipun di atas pertumbuhan nasional namun masih belum mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDB Indonesia karena banyak provinsi lain yang pertumbuhannya melaju lebih cepat.

Pertumbuhan ekonomi DIY juga yang paling rendah di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Hal ini memberikan tantangan terhadap perencanaan pembangunan DIY untuk dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan terutama untuk lapangan usaha potensial atau komoditas unggulan.

Berikut disajikan grafik PDRB subsektor perikanan di DIY dari tahun 2013-2018:



Gambar III.1 Grafik PDRB Subsektor Perikanan 2013-2018

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian juga untuk kontribusi sunsektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Struktur ekonomi berdasarkan PDRB di masing-masing kabupaten/kota, dapat dideteksi kategori yang memberikan pangsa terbesar dalam struktur PDRB. Di Kabupaten Kulon Progo adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Di Kabupaten Bantul yang dominan

adalah industri pengolahan, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Gunungkidul kontribusi tiga besarnya adalah pertanian, jasa pemerintahan, dan konstruksi. Di Sleman yang menjadi leading sector adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara di Kota Yogyakarta tiga kategori dengan kontribusi persentase terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan informasi dan komunikasi (BSD DIY, 2017)

Pada tahun 2018 produksi perikanan mencapai 102.432,649 Ton. Terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 95.937,783 Ton dan perikanan tangkap sebesar 6.494,866 Ton. Nilai produksi perikanan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti disajikan ada tabel berikut ini:

Tabel III.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2012	55,683.93	850,299,798
2013	62,897.27	1,041,326,296
2014	71,960.99	1,335,969,356
2015	74,705.24	1,417,009,418
2016	81,876.80	1,627,339,093
2017	95,365.52	1,895,433,672
2018	102.432,649	2,074,261,142

Sumber : Dislautkan, 2018

Meningkatnya produksi perikanan yang juga diikuti oleh meningkatnya nilai produksi perikanan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Peningkatan pendapatan ini juga berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.



Gambar III.2 Foto kegiatan budidaya dengan sistem Bioflok

Program utama yang mendukung tercapainya target PDRB sektor perikanan adalah Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengelolaan Pelabuhan, dan Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya. Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran:

Tabel III. 6 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

Sasaran	Program	Keuangan		
		Pagu	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya nilai produksi perikanan	Program Administrasi Perkantoran	3.659.486.221	3.431.683.128	93,77
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.761.349.000	1.725.506.270	97,97
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	382.434.050	382.103.800	99,91
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.369.211.700	2.321.489.700	97,99
	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1.191.771.250	1.166.890.300	97,91
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.079.604.800	1.030.480.720	95,45
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.661.957.050	2.568.340.184	96,48
	Program Pengelolaan Pelabuhan	159.646.360	147.018.700	92,09
	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	2.725.400.100	2.644.679.300	97,04
JUMLAH		15.990.860.531	15.418.192.102	96,42

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Dari tabel Capaian anggaran pendukung sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan terlihat bahwa rata-rata capaian anggaran sebesar 96,51%. Capaian anggaran tertinggi pada program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan sebesar 99,91% dan capaian anggaran terendah pada program Pengelolaan Pelabuhan, yaitu 92,09%. Semua program pendukung sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga indikator PDRB sektor perikanan dapat mencapai target.

Realisasi PDRB sektor perikanan melebihi 100% namun faktor pendukung utama yaitu perikanan budidaya mengalami penurunan luas lahan dan perikanan tangkap mengalami kendala karena belum optimalnya pelabuhan Tanjung Adikarta.

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan penurunan lahan yaitu dengan menerapkan intensifikasi sistem budidaya seperti minapadi, kolam bulat, dan budidaya ikan dengan sistem kincir. Sedangkan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pelabuhan Tanjung Adikarta yaitu dengan sistem KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Tim Percepatan Pembangunan Program Prioritas Pembangunan (TP 5) telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka proses KPBU dimulai dengan Capacity Building, konsultasi public, Penyerahan Studi Pendahuluan ke Pemda DIY, FGD di PT PII, FGD di Kemenko Kemaritiman, permohonan pencantuman PPP Book ke Bappenas, dan Penyusunan daftar prioritas proyek (DPP) Pelabuhan Tanjung Adikarta sesuai dengan gambar berikut ini:



Gambar III.3 . Kegiatan Penyiapan KPBU Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta

Pada tahun 2019 PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) akan menganggarkan untuk penyusunan dokumen mini FBC (*Final Bussiness Case*) yang bertujuan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam pemilihan badan usaha.

3.2.2 Sasaran Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan

Tolok ukur capaian sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Peningkatan status kawasan konservasi.

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indkator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	1. Tahap Penetapan RZWP3K 20% 2. Identifikasi dan Inisiasi kawasan konservasi 30% 3. Pencadangan kawasan konservasi, 60% 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 80% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 100%

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Peningkatan status kawasan konservasi terdiri dari empat tahap, yaitu: Penetapan RZWP3K, Identifikasi dan Inisiasi kawasan konservasi, Pencadangan kawasan konservasi, Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Penetapan Kawasan Konservasi.

Kawasan konservasi perairan di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Kawasan konservasi perairan di DIY berlokasi di Wediombo, Kabupaten Gunungkidul serta di Patehan dan Baros Kabupaten Bantul.

Kinerja sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan dengan indikator Peningkatan status kawasan konservasi pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan status kawasan konservasi	N/A	20	20	100	100	20

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Pada tahun 2018 ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah menyelesaikan tahapan penetapan RZWP3K yang ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 tanggal 24 September 2018. Sehingga capaian relisasi kinerja ini sebesar 100%.

Target kinerja sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan merupakan target kinerja baru pada tahun 2018 ini. Sehingga belum dapat diperbandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Capaian 2018 sebesar 20% jika dibandingkan terhadap target akhir kinerja dalam Renstra sebesar 100% maka capaian ini telah mencapai 20%-nya. Hal ini sudah sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan.

Secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia, sampai pada tahun 2018 ini baru terdapat 14 provinsi atau baru sebesar 41,18% provinsi di Indonesia dengan status Penyusunan RZWP3K yang sudah memiliki Perda. Hal ini tentunya merupakan salah satu capaian yang bagus dari Pemda DIY di tingkat nasional.



Gambar III.4 Foto Kegiatan Penyusunan KLHS RZWP3K

Program yang mendukung tercapainya target Terkelolanya kawasan konservasi perairan meliputi 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu
 - Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut,
 - Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.
2. Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Danais) , dengan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran:

Tabel III. 6 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

Sasaran	Program	Keuangan		
		Pagu	Realisasi	%Realisasi
Meningkatnya status kawasan konservasi	Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1.191.771.250	1.166.890.300	97,91
	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	480.225.000	467.474.100	97,34
Jumlah		1.671.996.250	1.634.364.400	97,63

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Capaian anggaran pendukung sasaran Meningkatnya status kawasan konservasi sebesar 97,63%, dengan dua program, yaitu Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, serta Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Tabel III.9 Indikator Kinerja dari Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	14	33,14	236,71
2	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	10	10	100

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Faktor-faktor Pendorong pencapaian kinerja ini adalah

- 1). Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjalan dengan baik;
- 2). Tim penyusun RZWP3K DIY bekerja optimal;
- 3). Ketersediaan benih ikan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang direncanakan;
- 4). Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peraturan perUndang-Undangan tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja ini adalah masih kurangnya frekuensi pengawasan di laut, perairan umum daratan, perikanan budidaya dan pengawasan mutu hasil perikanan. Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain penambahan frekuensi pengawasan di laut, perairan umum daratan, perikanan budidaya dan pengawasan mutu hasil perikanan sehingga diperlukan penambahan alokasi anggaran.



Gambar III.4 Foto Kegiatan Pengawasan Laut

Dengan demikian sasaran Meningkatnya satatus kawasan konservasi dengan Indikator Peningkatan status kawasan konservasi **dapat disimpulkan berhasil dengan capaian kinerja 100%.**

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga ditunjukkan oleh target pencapaian kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.9 Indikator Kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	nilai	100,00	101,80	101,80
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	nilai	116,13	121,89	104,96
3	Nilai Eksport Hasil Perikanan	USD	79.200	606.104,5	767,22
4	Konsumsi Ikan per Kapita Nasional	Kg/kapita/th	24,00	24,00	100,00
5	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	89.336	95.937,783	107,39
6	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	5.817	6.494,866	111,65
7	Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik) untuk komoditas ekspor	Unit	5	5	100,00
8	Jumlah unit pembudidaya ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar untuk komoditas ekspor	Unit	20	20	100,00
9	Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	Sampel	37	37	100,00

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja, semua indikator menunjukkan capaian $\geq 100\%$. Indikator dengan capaian tertinggi adalah Jumlah produksi perikanan tangkap dengan capaian 111,65%.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya dan nelayan di pedesaan. Semakin tinggi nilai NTPi atau NTN maka akan relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya belinya. Dari kedua indikator tersebut realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101,8% dari targetnya dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104,96% dari targetnya. Realisasi kedua indikator ini berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 termasuk sangat baik.

Pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya dengan realisasi mencapai 107,39% dan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 111,65%.

Capaian kinerja indikator Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik) untuk komoditas ekspor, Jumlah unit pembudidaya ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar untuk komoditas ekspor dan Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu adalah 100% untuk ketiga indikator tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat baik, dengan **capaian kinerja diatas 100%**.

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96,38%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 65,24%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 34,76%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan yaitu pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan (99,91%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan, yaitu pada Program Pengelolaan Pelabuhan 92,09%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	318947	317809	99.64	Program Administrasi Perkantoran	3.659.486.221	3.431.683.128	93,78
						Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.481.224.000	1.449.233.670	97,84

						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	382.434.050	382.103.800	99,91
						Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.369.211.700	2.321.489.700	97,99
						Program Pengelolaan Pelabuhan	159.646.360	147.018.700	92,09
						Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	2.725.400.100	2.644.679.300	97,04
						Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.079.604.800	1.030.480.720	95,45
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.661.957.050	2.568.340.184	96,48
	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi	20	20	100	Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1.191.771.250	1.166.890.300	97,91
						Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	480.225.000	467.474.100	97,34
	Jumlah Total Belanja Langsung						16.190.960.531	15.142.386.976	96,59

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Berikut disajikan tabel Analisis efisiensi untuk setiap sasaran dan indikator kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY:

Tabel 3.6 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	100,44	96,25	3,75
2	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi	100	97,63	2,37

(Sumber: Dislautkan DIY, 2018)

Analisis Efisiensi

Dari 2 (dua) Sasaran strategis, terdapat 2 (dua) sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan nilai produksi perikanan telah mencapai kinerja sebesar 96,25% dengan efisiensi anggaran 3,75%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan sistem administrasi.
2. Sasaran Meningkatkan status kawasan konservasi telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 2,09%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan sistem administrasi.

BAB 4

Penutup

Bab 5 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis kedua sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2018, kedua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.
2. Pencapaian sasaran yang memenuhi target dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penerapan intensifikasi sistem budidaya seperti minapadi, kolam bulat, dan budidaya ikan dengan sistem kincir.
2. Optimalisasi pelabuhan Tanjung Adikarta yaitu dengan sistem KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).
3. Penambahan frekuensi pengawasan di laut, perairan umum daratan, perikanan budidaya dan pengawasan mutu hasil perikanan

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

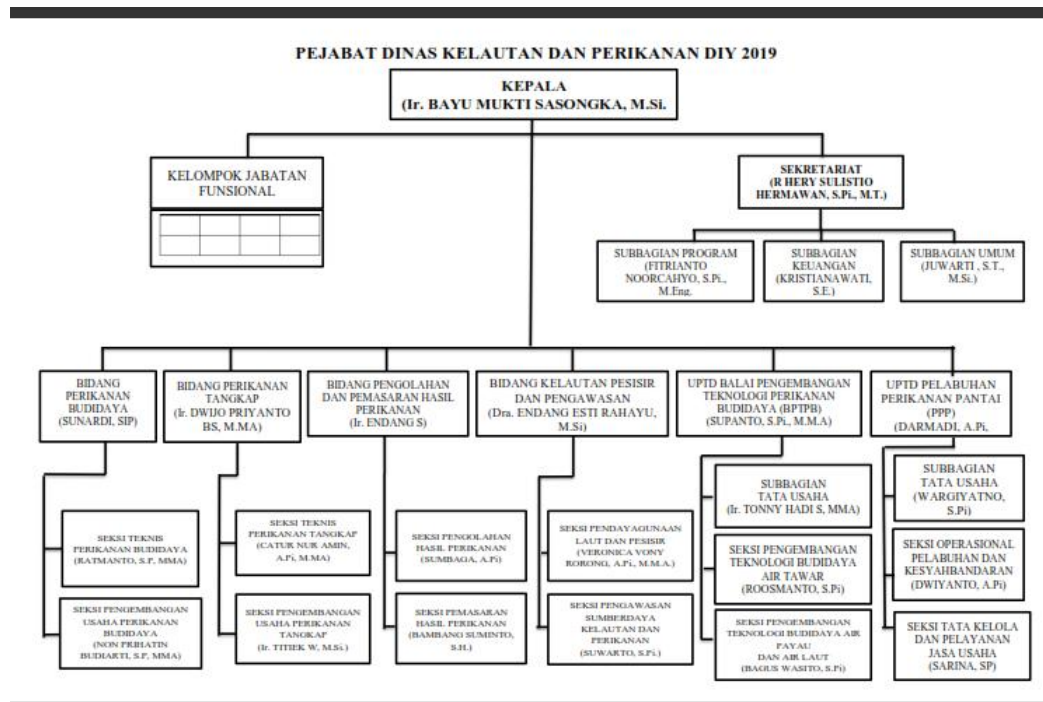
Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sagan III/4, Yogyakarta, Telepon (0274) 512386; Faksimile (0274) 560386
Website : <http://www.dislautkan.jogjapro.go.id>; Email : dislautkan@jogjapro.go.id; Kode Pos 55223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN DIY

HAMENGKU BUWONO X


Ir. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sagan Nomor III/4, Telepon (0274) 512386 Faksimili (0274) 560386
YO GYAKARTA

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Mempertahankan/meningkatkan kinerja yang telah dicapai, yaitu pada Aspek Perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja	Telah dipertahankan/ditingkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada aspek Perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja
2	Melakukan upaya perbaikan pada aspek Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi, khususnya capaian kinerja dari penilaian stake holder	Telah dilakukan upaya perbaikan pencapaian sasaran kinerja organisasi, pencapaian kinerja mencapai 100% .

Kepala,

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

No	Nama penghargaan	Tgl/bln/tahun	Pemberi penghargaan	Skala	Tingkatan/ Juara Ke	Keterangan
1	Satker Terbaik	Desember 2018	Kementrian Kelautan dan Perikanan DIY	Nasional	II	 Sebagai satuan kerja tingkat Provinsi terbaik II tahun 2018 dalam penilaian capaian indikator kinerja, evaluasi kinerja anggaran dan kepatuhan serta kerjasama dalam mendukung satu data KKP
2	Ketaatan penyampaian laporan monitoring penyakit ikan Pada tahun 2017 dan 2018	Desember 2018	DJPB KKP RI	Nasional	I	 Provinsi Terbaik I dalam rangka ketaatan penyampaian laporan monitoring penyakit ikan pada tahun 2017 dan